

MAKI: Alasan Firlu Absen Diperiksa Polda Metro Hanya Mengada-ada

JAKARTA (IM) - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mempertanyakan alasan Ketua KPK Firlu Bahuri absen dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya PADA Jumat (20/10). MAKI menilai alasan Firlu hanya karangan saja.

"Kalau alasan sekarang baru mempelajari, itu alasan yang mengada-ada, alasan yang dikarang-karang," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Jumat (20/10).

Firlu tidak penuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dalam salah satu alasannya, Firlu mengaku masih membutuhkan waktu untuk mempelajari kasus tersebut. Boyamin menilai alasan Firlu janggal. Pasalnya, penanganan kasus pemerasan pimpinan KPK kepada SYL telah dibuka kepada publik oleh Polda Metro Jaya sejak lama.

"Tapi ya aneh kalau alasannya kemudian mau mempelajari. Isu tentang dugaan pemerasan ini kan jauh-jauh hari sebelumnya dan Polda

tidak diam-diam menyelidiki ini. Penyelidikan dan naik penyidikan diumumkan, manggil siapa-siapa itu diumumkan semua," tutur Boyamin.

Menurut Boyamin, ada perasaan takut di balik alasan absennya Firlu dari pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jumat kemarin.

"Pernyataan yang naif dan kelihatan ya boleh dikatakan takut. Karena bisa jadi merasa ada dalam pikirannya Pak Firlu kira-kira wah ini gawat nih," katanya.

Lebih lanjut Boyamin meminta Polda Metro Jaya segera menjadwalkan pemeriksaan kepada Firlu. Kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada SYL itu harus dituntaskan hingga diumumkan tersangkanya kepada masyarakat.

"Yang harusnya dilakukan Polda melakukan pemanggilan kedua. Senin atau Selasa dipanggil lagi. Nanti kalau tidak datang, ya dilakukan jemput paksa sesuai prosedur hukum. Soal nanti bisa ditetapkan jadi tersangka atau tidak, ditahan atau tidak, itu perkembangannya nanti," ujar Boyamin. ● han

Zulhas dan Erick Sudah di Jakarta

Jelang Penentuan Cawapres Prabowo

JAKARTA (IM) - Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto disebut-sebut akan mengumumkan bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi pada Pilpres 2024, dalam waktu dekat ini.

Menjelang penentuan cawapres, Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir dikabarkan telah tiba di Indonesia sejak Jumat (20/10) siang.

"Sudah mendarat dari Riyadh," kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Jumat (20/10).

Viva mengatakan posisi Zulhas dan Erick sudah berada di Jakarta saat ini.

"Iya, dari Riyadh ke Jakarta. Ya siang ini," katanya.

Untuk diketahui, Zulhas dan Erick dari Republik Rakyat China (RRC) mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana. Mereka lalu melawat ke Riyadh, Arab Saudi. Berdasarkan keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Presiden, Kamis (19/10), pesawat Garuda Indonesia (GIA-1)

yang membawa Jokowi dan rombongan tiba di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, sekitar pukul 23.25 waktu setempat. ● mei

KPK Periksa Sopir dan Ajudan SYL Terkait Kasus Korupsi di Kementan

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sopir dan ajudan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.

"Hari ini (20/10) bertempat di gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi di antaranya Panji Harjanto (Ade Menteri Pertanian) dan Hartoyo alias Heri (sopir Menteri Pertanian)," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Jumat (20/10).

Selain Ade dan sopir, penyidik KPK juga memeriksa dua orang saksi lain, yakni Donal Fariz sebagai

pengacara dan Hermanto merupakan Seditjen Sarana dan Prasarana Pertanian.

Kendati demikian, Ali Fikri belum menjelaskan secara rinci terkait materi dari pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi tersebut.

Sebagaimana diketahui, Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan sejak Kamis (12/10) malam hingga Jumat (13/10) sore.

Syahrul Limpo ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya yakni Kasdi Subagyo (KS) dan Direktur Alat Mesin Pertanian Kementerian Muhammad Hatta (MH). ● mei

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



PEMERIKSAAN TERSANGKA KASUS GUGAAN KORUPSI SYAHRUL YASIN LIMPO
Tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kanan) berjalan menuju ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (20/10). Mantan Menteri Pertanian itu diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pemerasan dalam jabatan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Survei LSI: Pendukung PKB Lebih Banyak Pilih Ganjar, dan Pemilih PPP ke Prabowo

Sebanyak 37,6% pendukung PKB pilih Ganjar. Justru hanya 37,0% pemilih PKB ke Anies. Pendukung PPP justru kebanyakan capres Prabowo.

JAKARTA (IM) - Hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) memperlihatkan, pendukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lebih banyak memilih bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.

Meski Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar maju sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal capres Anies Baswedan, suara pendukung PKB mayoritas bukan ke pasang-

an capres-cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan tersebut.

Survei mencatat, 37,6 persen pendukung PKB memilih Ganjar. Terpaut tipis, 37,0 persen pemilih PKB mendukung Anies. Sebaliknya, pendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mayoritas bukan memilih Ganjar, melainkan bakal capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto. Padahal, PPP telah berkoalisi dengan PDI-P men-

dukung pencapresan Ganjar.

Menurut survei, 41,9 persen pendukung PPP memilih Prabowo. Lalu, 25,0 persen pemilih partai Kabah mendukung Ganjar. Adapun Ganjar mendapat dukungan paling besar dari pemilih PDI-P, yaitu 75,6 persen. Lalu, Prabowo mendulang suara terbanyak dari pendukung Partai Gerindra, yakni 78,8 persen. Sementara, Anies banyak didukung oleh massa Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yaitu 73,3 persen.

Berikut pilihan bakal capres menurut pilihan partai politik, merujuk survei terbaru LSI:

Prabowo Subianto: PDI-P: 17,9 persen, Gerindra 78,8

persen, Golkar 47,6 persen, PKB 24,9 persen, Nasdem 31,9 persen, PKS 19,0 persen, Demokrat 43,0 persen, PAN 49,4 persen, PPP 41,9 persen.

Ganjar Pranowo: PDI-P: 75,6 persen, Gerindra 13,4 persen, Golkar:21,1 persen, PKB 37,6 persen, Nasdem 17,8 persen, PKS 6,3 persen, Demokrat 24,2 persen, PAN 23,2 persen, PPP 25,0 persen.

Anies Baswedan: PDI-P 5,6 persen, Gerindra 7,6 persen, Golkar 30,4 persen, PKB 37,0 persen, Nasdem 48,2 persen, PKS 73,3 persen, Demokrat 27,6 persen, PAN 17,8 persen, PPP 33,1 persen.

Survei juga memetakan elektabilitas tiga bakal capres. Hasilnya, angka elektoral Prabowo unggul dibandingkan Ganjar dan Anies. Dalam simulasi tiga nama, Prabowo mengantongi elektabilitas 37 persen. Angka tersebut meningkat sekitar 5 persen dibandingkan survei April 2023 di mana elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra itu sebesar 32,5 persen.

Sementara, mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengekor di urutan kedua dengan elektabilitas 35,2 persen, terpaut 1,8 persen dari angka elektoral Prabowo. Sama dengan Prabowo, tingkat keterpilihan Ganjar juga naik dibandingkan survei April 2023. Namun, kenaikannya hanya sekitar 1 persen dari elektabilitas sebelumnya sebesar 34,1 persen.

Selanjutnya, Anies Baswedan berada di urutan ketiga dengan elektabilitas 22,7

persen. Berbeda dari Prabowo dan Ganjar, angka elektoral mantan Gubernur DKI Jakarta itu justru menurun dibandingkan survei periode April 2023. Saat itu, Anies mencatatkan elektabilitas 25,9 persen. Untuk lebih jelasnya, berikut elektabilitas tiga bakal capres Pilpres 2024 menurut simulasi tiga nama survei LSI:

Prabowo Subianto: Januari 2021 (35,5 persen), Mei-Juni 2022 (33,1 persen), April 2023 (32,5 persen), Oktober 2023 (37,0 persen).

Ganjar Pranowo: Januari 2021 (25,3 persen), Mei-Juni 2022 (32,1 persen), April 2023 (34,1 persen), Oktober 2023 (35,2 persen).

Anies Baswedan: Januari 2021 (25,7 persen), Mei-Juni 2022 (25,1 persen), April 2023 (25,9 persen), Oktober 2023 (22,7 persen).

Tidak tahu/tidak jawab: Januari 2021 (14,5 persen), Mei-Juni 2022 (9,8 persen), April 2023 (7,5 persen), Oktober 2023 (5,2 persen).

Adapun survei LSI ini digelar pada 2-8 Oktober 2023. Survei melibatkan 1.620 responden yang dipilih secara acak melalui metode multistage random sampling.

Survei dilakukan terhadap seluruh WNI yang punya hak pilih di pemilu, yakni yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah. Responden terpilih diwawancara lewat tatap muka. Dengan metode ini, margin of error survei sebesar +/- 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. ● han



PANGLIMA TNI OLAHRAGA BERSAMA DI MADIUN

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono (kanan), Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf (kiri), Wali Kota Madiun Maldi (tengah) mengikuti jalan sehat saat olahraga bersama di Kota Madiun, Jawa Timur, Jumat (20/10). Kegiatan olahraga bersama tersebut diikuti ratusan orang dari anggota TNI dan Polri, organisasi isteri prajurit TNI serta pejabat daerah di Madiun.

Senin, MK Putuskan soal Gugatan yang Bisa Jegal Prabowo Maju sebagai Capres

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) bakal membacakan putusan gugatan syarat calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang bisa menjegal Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, Senin (23/10) mulai pukul 10.00.

Putusan berkaitan dengan kans Prabowo itu tercatat pada perkara nomor 102, 104, dan 107/PUU-XXI/2023 dengan obyek gugatan Pasal 169 huruf d dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

Tiga perkara tersebut tidak pernah diperiksa di sidang. Tahapan terakhir yang dilalui adalah pemeriksaan permohonan dan perbaikan permohonan kedua pada 2 dan 4 Oktober 2023.

Perkara ini diajukan Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari, dan Rio Saputro, dengan menyertakan 98 advokat. Mereka mengajukan 2 petuitum. Pertama, meminta MK membatasi syarat usia capres-cawapres 40-70 tahun.

Mereka menganggap bahwa untuk mengelola In-

donesia menjadi negara maju, dibutuhkan mobilitas yang sangat tinggi karena wilayah Indonesia sangat luas. Selain itu, mereka juga menilai pasal yang ada sekarang memberikan ketidakpastian hukum karena hanya mengatur batas bawah usia capres tanpa mengatur batas atasnya.

Mereka menjadikan batas atas usia hakim konstitusi dan hakim agung yang tidak boleh melebihi 70 tahun sebagai perbandingan.

Kedua, mereka ingin agar MK mengubah Pasal 169 huruf d UU Pemilu guna melarang pelanggaran HAM maju sebagai capres. Dalam petuitum gugatannya, mereka meminta supaya larangan itu berbunyi "Tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran HAM berat, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau

pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi, serta tindak pidana berat lainnya."

Mereka juga mengutip Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur tentang pemberhentian presiden dan wakil presiden apabila "Terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden".

Sementara itu, Prabowo, yang kini berusia 72 tahun merupakan Komando Pasukan Khusus TNI AD yang membawahi Tim Mawar. Tim ini diduga mendalangi operasi penculikan dan penghilangan paksa puluhan aktivis pada tahun 1997-1998. Perkara 104/PUU-XXI/2023.

Perkara ini dilayangkan Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Gulfino Guevaratto. Fitra sebelumnya mengklaim bahwa gugatan ini urusan pribadi, bukan sikap kelemabagan.

Gulfino juga mengajukan 2 petuitum. Pertama, meminta

usia capres-cawapres dibatasi pada rentang 21-65 tahun saat pengangkatan pertama. Hal ini ditujukan untuk mencapai "sinkronisasi horizontal" dengan kekuasaan legislatif dan yudikatif.

Batas bawah usia 21 tahun mengacu pada usia minimum syarat menjadi anggota legislatif. Sementara itu, batas atas usia 65 tahun mengacu pada usia minimum syarat diangkat sebagai hakim.

Menurut dia, sinkronisasi horizontal antara lembaga tinggi negara ini adalah metode rasional untuk menjelaskan mengapa usia capres-cawapres harus dibatasi pada usia tertentu.

Kedua, Gulfino ingin MK membatasi kesempatan seseorang maju sebagai capres atau cawapres hanya 2 kali. Menurut mereka, tindakan itu adalah tindakan yang mencerminkan "etika dan kenegaraan" untuk memberi kesempatan kepada pihak lain, yang harus dirumuskan melalui norma baku UU Pemilu.

"Karena kalau seorang calon menggunakan haknya berkali-kali, hak kami yang juga punya berhak mencairkan diri terberangus,"

kata kuasa hukum Gulfino, Donny Tri Istiqomah, dalam jumpa pers, Senin (21/8).

Jika dikabulkan, ini tentu bakal menjerat Prabowo yang sudah 2 kali keok dari Joko Widodo pada Pilpres 2014 dan 2019. Perkara 107/PUU-XXI/2023 Gugatan ini dilakukan oleh Rudy Hartono yang menginginkan agar capres yang ikut kontestasi berusia tidak lebih dari 70 tahun.

Ia menilai, pengaturan usia maksimum ini tak terpisahkan dari syarat lain pengajuan capres-cawapres, yaitu "mampu secara jasmani dan rohani".

"Dalam kenyataannya, kemampuan jasmani dan rohani dipengaruhi oleh kematangan usia (batas usia minimal) serta masa usia produktif seseorang (batas usia maksimal)," jelas Rudy dalam permohonannya.

Sama dengan kubu 98 advokat, Rudy menjadikan batas atas usia hakim konstitusi dan hakim agung yang tidak boleh melebihi 70 tahun sebagai basis argumentasi. ● han

Mahfud MD Minta kepada Seluruh Pegawai Kemenko Polhukam Tak Terlibat Politik Praktis

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta kepada seluruh pejabat utama dan pegawai Kemenko Polhukam agar tidak terlibat politik praktis.

Ia meminta seluruh pegawai Kemenko Polhukam agar bekerja seperti biasa, dan tidak perlu ikut-ikutan dalam politik di Pemilu 2024.

"Saya secara resmi sudah didaftarkan menjadi calon wakil presiden. Pesan saya, saudara tetap bekerja seperti biasa. Tidak usah ikut-ikutan urusan politik. Tidak usah mendukung atau tidak mendukung saya," kata Mahfud saat apel di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (20/10).

Mahfud yang telah resmi mendaftarkan diri sebagai Calon wakil presiden (Cawapres) untuk Ganjar Pranowo itu menegaskan, pencalonannya merupakan urusan pribadi, dan tidak membawa

jabatan sebagai Menko Polhukam.

"Itu urusan pribadi saudara dan keluarga saudara di rumah, tapi di kantor ini jangan gunakan fasilitas untuk memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain," katanya.

"Tidak boleh ikut-ikutan politik, kampanye, buat barisan, mendukung Menko Polhukam atau menolak Menko Polhukam, itu soal lain. Urusan Mahfud MD, bukan urusan Menko Polhukam," ujarnya.

Dalam kesempatan Mahfud juga menyampaikan netralitas kepada seluruh aparat serta institusi pemerintah.

"Oleh sebab itu, tugas-tugas yang selama ini saudara lakukan sudah dengan baik, itu diteruskan. Harus netral. Ini juga akan saya sampaikan kepada semua aparat dan institusi pemerintah, agar pemilu berjalan netral," katanya. ● mei

KEHILANGAN

Telah hilang Sertipikat Hak Milik No.3154 Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, luas 700 M2 a/n Ny.Kusumawaty.

KEHILANGAN

Telah hilang Sertipikat Hak Milik No.3721 Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, luas 609 M2 a/n Ny.Kusumawaty.